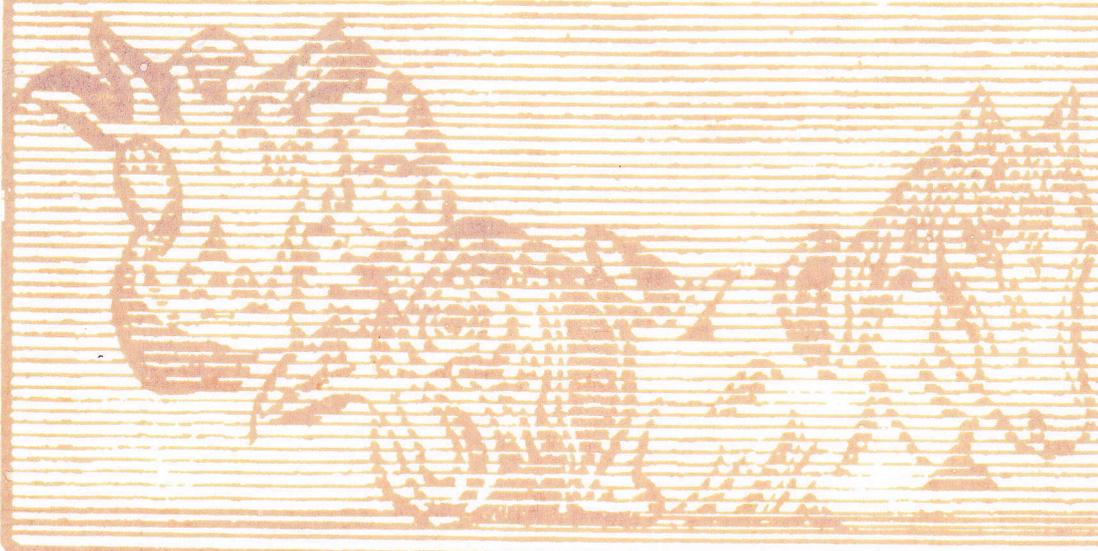




**Jurnal**

VOLUME 31  
JULI 2010

ISSN 0852 - 2626



*media informasi civitas academica  
fakultas peternakan universitas sam ratulangi*

**JURNAL ZOOTEK ( "ZOOTEK" JOURNAL)**

**INTERNATIONAL STANDARD OF SERIAL NUMBER**

**(ISSN) 0852-2626**

**diterbitkan oleh (was published by)**

**FAKULTAS PETERNAKAN, UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**(Faculty of Animal Science, Sam Ratulangi University)**

**MANADO – INDONESIA**

**PENANGGUNG JAWAB**

Marie Najoan

(Dekan)

**DEWAN PENYUNTING**

Vicky V. J. Panelewen

Artise H. S. Salendu

Josephine L. P. Saerang

Femi H. Elly

Kartini Maaruf

**PENYUNTING PELAKSANA**

Jola J. M. R. Londok

Umar Papatungan

**ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN**

Sutriaty S. Malalantang

Jurnal Zootek (ISSN 0852-2626) terbit 2 kali setahun. Harga langganan Rp. 30.000 per edisi atau Rp. 60.000 per tahun. Redaksi menerima sumbangan tulisan/karya ilmiah hasil-hasil penelitian di bidang ilmu peternakan dan atau yang terkait dengan peternakan, yang belum pernah dipublikasikan dalam jurnal lainnya ("Zootek" Journal (ISSN 0852-2626) is published secondly (every 6 months) per year. The annual price of customer is Rp. 60,000 or Rp. 30,000 per edition. Team receives original papers both in animal sciences or animal husbandry, which were not published by other Journal).

**Alamat Redaksi (Business Office Address)**

**Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi**

**Kampus Unsrat Bahu-Manado Sulawesi Utara, 95115**

**Telp. (0431)-863186**

**E-mail: jurnalzootek@unsrat.ac.id**

## DAFTAR ISI (CONTENTS)

Daftar isi (Contents) ..... ii

1. **Analisis Pemberian Pakan Menurut Metode Trainer Kuda Pacu Di Sulawesi Utara** (Analysis by Method of Giving Feed Racehorse Trainer In North Sulawesi). **Yohannis Tulung, Suryahadi, Wasmen Manalu dan Bernat Tulung; 101-112.**
2. **Identifikasi Jenis Burung pada Berbagai Tipe Pertanian Di Sekitar Cagar Alam Gunung Ambang.** (Identification of Birds Species at Various Land Cropping Types Around Gunung Ambang Reserve). **S. Dali; 113-118.**
3. **Kajian Frekuensi Pemberian Pakan terhadap Konsumsi Pakan, Efisiensi Pakan dan Berat Telur Ayam Ras.** (Study of Feeding Time Frequency On Feed Consumption, Feed Efficiency And Egg Weight Of Laying Hen). **Jacqueline T. Laihad, Wapsiaty Utiah dan Martina E.R. Montong; 119-124.**
4. **Kecernaan Kalsium (Ca) dan Fosfor (P) Ternak Babi yang Mengonsumsi Ransum Mengandung Dedak Halus Terfermentasi** (Calcium (Ca) and Phosphorus (P) Digestibility of Growing Pigs Consumed Diet Consisting Fermented Rice Bran). **Syul K. Dotulong; 125-132.**
5. **Kecernaan Ransum yang Ditambahkan Silase Jerami Padi pada Ternak Kambing Lokal** (The Digestibility of Diet Added with Rice Straw Silage on Local Goats). **S. Dali dan J.F. Umboh; 133-141.**
6. **Pengaruh Substitusi Jagung Kuning dengan Tepung Umbi Kimpul (*Xanthosoma Sagittifolium* Schott) dalam Ransum terhadap Performans Ternak Babi.** (Effect of Substitution of Yellow Corn With Taro Meal (*Xanthosoma Sagittifolium Schott*) in The Diet on Pig Performance). **Syul K. Dotulong, Florencia N. Sompie, Sofie Sembor, Jola J.M.R. Londok dan Meity R. Imbar; 142-149.**
7. **Pengaruh Suplementasi VCO (*Virgin Coconut Oil*) dalam Ransum Berbasis Serat Kasar Tinggi terhadap Kadar Kolesterol, HDL, dan LDL Serum Broiler.** (Effects of VCO Supplementation in Ration Based on High Dietary Fiber on Serum Cholesterol, HDL, and LDL of Broiler). **Jola J.M.R. Londok, John E.G. Rompis dan Mursye N. Regar; 150-156.**
8. **Standardisasi Kebutuhan Energi dan Nutrien Kuda Pacu Indonesia Berdasarkan Konsumsi, Bobot Metabolik dan Beban Kerja.** (Standardization of Energy and Nutrients Requirements of Indonesia Racehorse Based on Consumption, Metabolic Weight and Work Load). **Yohannis Tulung, Suryahadi, Wasmen Manalu dan Bernat Tulung; 157-166.**
9. **Tingkah Laku Maleo (*Macrocephalon maleo*) yang Dipelihara secara *ex situ*.** (Behaviour of Maleo Raised *Ex Situ*). **Josephine Louise Pinky Saerang; 167-173.**
10. **Usaha Ternak Sapid an Biaya Transaksi di Kabupaten Minahasa.** (The Cattle Farming and Transaction Cost in Minahasa). **Femi H. Elly; 174-183.**

Petunjuk untuk penulis naskah (Direction for script writer) . . . . .iii

## USAHA TERNAK SAPI DAN BIAYA TRANSAKSI DI KABUPATEN MINAHASA

Femi H. Elly \*)

Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115.

### ABSTRAK

Kegiatan ekonomi yang berbasis peternakan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki prospek ke depan. Petani peternak dalam melakukan aktivitas ekonomi mengeluarkan biaya yang meliputi biaya produksi dan biaya transaksi. Biaya ini mempengaruhi pendapatan yang diterima petani peternak. Permasalahannya berapa besar biaya transaksi yang dikeluarkan oleh petani peternak dalam melakukan penjualan ternak sapi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis besarnya biaya transaksi penjualan ternak sapi di Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Penentuan kecamatan dan desa secara purposive sampling. Petani peternak sapi sebanyak 194 responden ditentukan secara simple random sampling. Petani peternak sapi 85.50 persen (165 orang) menjual ternaknya di pasar blantik, sisanya 14.50 persen menjual di rumah petani peternak atau mendatangi pedagang. Total biaya transaksi di Minahasa sebesar Rp 5972,98/kg. Rasio biaya transaksi dan penerimaan per kg ternak sapi hidup sebesar 0.17. Rasio biaya transaksi dan total biaya ternak sapi per kg sebesar 0.27. Nilai rasio biaya transaksi dan pendapatan per kg ternak sapi sebesar 0.47. Kesimpulannya, biaya transaksi yang dikeluarkan petani peternak sapi di Minahasa adalah biaya perantara, transport, administrasi dan retribusi. Biaya transaksi yang terbesar adalah biaya perantara. Berdasarkan hasil penelitian disarankan perlu intervensi

pemerintah dalam perbaikan kelembagaan dalam bentuk kelompok atau koperasi.

**Kata Kunci:** Ternak sapi, Biaya transaksi, Efisiensi usaha.

### ABSTRACT

THE CATTLE FARMING AND TRANSACTION COST IN MINAHASA REGENCY. Farm based economic activity is one activity that has a future prospect. Peasant farmers in economic activity which includes the cost of production costs and transaction costs. These costs affect the income received by farmers. The problem is how much the transaction costs incurred by the farmer in selling cattle. Research that has been done is aimed to analyze the transaction costs of selling cattle in Minahasa. The research method used was a survey method. Determination of sub-districts and villages by purposive sampling. Farmer respondents as many as 194 cattle determined by simple random sampling. Farmer's cattle 85.50 percent (165 people) sell livestock in the broker market, the rest is 14,50 percent farmers sell home traders approached. Total transaction costs Rp 5972.98/kg. The ratio of transaction costs and revenue per kg of cattle at 0,17. The ratio of transaction costs and the total cost of cattle per kg 0.27. Value ratio of transaction costs and income per kg of cattle for 0,47. In conclusion, the transaction costs incurred in Minahasa farmer are brokerage fees, transport, administration and retribution. Transaction costs are the biggest brokerage fees. Based on the results of the study suggested the need for government

\* Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan

intervention in the form of improved institutional or cooperative group.

**Keywords:** *Cattle, Transaction costs, Efficiency*

## PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Negara kita yang dilanda krisis moneter sangat berdampak sampai pada daerah-daerah. Dampak ini berpengaruh terhadap harga produk dan harga input. Peningkatan harga produk dan harga input disebabkan tingginya biaya transpor. Faktor penyebab tingginya biaya transpor adalah naiknya harga BBM. Secara teori biaya transpor merupakan salah satu biaya dalam biaya transaksi. Adanya biaya transaksi menurut Sadoulet *et al* (1995), melanggar asumsi *separable*. Naiknya biaya transaksi menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*). Biaya transaksi yang sangat tinggi Menurut Matungul, *et al.* (2006), dapat mempengaruhi pasar input dan pasar output. Dutilly-Diane, *et al.* (2003) dalam penelitiannya mempelajari kegagalan pasar pada rumahtangga petani peternak yang disebabkan adanya biaya transaksi.

Di Indonesia, peternakan memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari sumberdaya yang tersedia sangat mendukung pengembangan tersebut. Peternakan di Sulawesi Utara merupakan salah satu bagian dalam pembangunan sektor pertanian (Elly, 2008). Kegiatan ekonomi yang berbasis peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki prospek ke depan.

Petani peternak dalam melakukan aktivitas ekonomi

mengeluarkan biaya. Biaya tersebut meliputi biaya produksi dan biaya transaksi. Biaya ini mempengaruhi pendapatan yang diterima petani peternak. Menurut Kriswanto *et al* (2004), keberhasilan usaha ternak dapat diukur dari tingkat pendapatan yang diterima petani peternak.

Dalam teori ekonomi, salah satu kegagalan pasar yang terjadi disebabkan karena adanya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi lebih besar karena adanya ketidaksempurnaan pasar menyebabkan produk yang dapat diproduksi secara efisien tidak terjadi. Hal inilah yang mengakibatkan kegagalan pasar (Elly, 2008). Biaya transaksi dapat menyangkut faktor internal dan eksternal usahatani. Dalam hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara rancangan internal dan eksternal usahatani atau struktur penguasaan. Rancangan internal menunjukkan hubungan struktur penguasaan antara pemilik usahatani, manajer (dalam hal ini petani dapat sebagai pemilik dan sebagai manajer) dan pekerja. Rancangan eksternal menunjukkan hubungan struktur penguasaan petani dalam pasar.

Rancangan internal dan eksternal dicirikan oleh masalah *moral hazard* sebagai hasil biaya organisasi atau biaya transaksi internal dan biaya menggunakan pasar atau biaya transaksi eksternal. Rancangan internal ditentukan oleh hubungan *principal-agent* antara rumahtangga dan pekerja usahatani. *Moral hazard* dalam usahatani adalah suatu konsekuensi kombinasi dari sulitnya menghubungkan usaha untuk output dalam tim produksi. Rancangan eksternal menunjukkan hubungan

*principal-agent* dalam pasar, misalnya transaksi dengan kompetitor, supplier sumberdaya, pembeli, bank dan sebagainya. Masalah *moral hazard* dikarenakan biaya transaksi menggunakan pasar. Biaya transaksi pasar dapat menghasilkan ketidakefektifan dalam pasar input maupun pasar output.

Rancangan eksternal dalam rumahtangga petani peternak mencakup pilihan dari lingkup usaha ternak (*scope*), jangka waktu usaha (*span*), kecepatan usaha (*speed*) dan skala usaha (*scale*). Lingkup usaha ternak menunjukkan jumlah aktivitas yang dikerjakan dalam produksi usaha ternak (diversifikasi produk) dan *off-farm*. Berkaitan dengan jangka waktu, biaya transaksi akan meningkat sebagai hasil spesifikasi produksi dalam rantai produk vertikal. Masalah jangka waktu ini menyangkut penjualan output. Kecepatan usaha menunjukkan tingkat inovasi pengembangan bisnis usaha ternak. Kecepatan usaha dapat dilihat dari apakah rumahtangga melakukan investasi dalam usahanya atau tidak. Sedangkan skala usaha menunjukkan ukuran usaha pada aktivitas usaha ternak. Skala usaha dilihat dari total output usahatani.

Tujuan untuk melakukan transaksi tidak hanya menyangkut output tetapi juga berkaitan dengan usahatani seperti lahan, tenaga kerja, mesin-mesin serta pembelian input dan jasa (Sartorius, 2006). Biaya transaksi digambarkan sebagai biaya untuk memperoleh barang dan jasa dengan teknologi tertentu. Biaya transaksi dapat terjadi sebagai hasil teknologi, bagian tenaga kerja, lokasi pasar atau pelaku-pelakunya. Menurut

Allen and Lueck (2004), biaya transaksi adalah penting dalam pertanian karena alam (seperti musim, cuaca juga penyakit) dapat berpengaruh dalam proses menghasilkan output dan hal ini membatasi petani untuk spesialisasi.

Biaya transaksi dapat terjadi mulai dari aktivitas penanaman, panen dan distribusi. Aktivitas tersebut terjadi baik pada petani skala besar maupun petani skala kecil. Petani dengan skala kecil dapat menghasilkan biaya transaksi lebih tinggi dibanding petani skala besar. Biaya transaksi menurut Williamson (2008) berkaitan dengan kelembagaan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka yang menjadi permasalahan adalah biaya transaksi apa saja yang ditanggung petani peternak dan berapa besar biaya transaksi yang dikeluarkan oleh petani peternak dalam melakukan penjualan ternak sapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan petani peternak sapi di Minahasa dalam melakukan penjualan ternak sapi.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa dengan menggunakan metode survey. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap petani peternak sapi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini. Kecamatan dan Desa sampel di Minahasa sesuai hasil penelitian Elly (2008) ditentukan secara *purposive sampling* yaitu kecamatan dan desa-desa yang

memiliki populasi ternak sapi terbanyak. Kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Tompaso (desa Toure, Pinabetengan, Tonsewer dan Tempok) dan kecamatan Kawangkoan (desa Tondegesan dan Kawangkoan 2) (Elly, 2008). Petani peternak sapi sebagai sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu petani peternak yang mempunyai populasi ternak sapi terbanyak, pernah jual ternak dan usahatani dominan adalah kelapa. Berdasarkan sampel petani peternak sapi ditentukan responden secara *simple random sampling*, sebanyak 194 petani peternak sapi (Elly, 2008). Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah analisis deskriptif dan efisiensi usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biaya Transaksi dan Peraturan Daerah

Usaha ternak sapi selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Elly (2008) mengemukakan bahwa pendapatan daerah bidang peternakan diperoleh dari izin usaha pertanian dan peternakan, pungutan retribusi ternak serta hasil-hasilnya. Lebih lanjut menurut Elly (2008), kondisi tersebut merupakan wujud nyata otonomi daerah. Otonomisasi daerah didasarkan pada undang-undang No 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya adalah upaya pengelolaan sumberdaya alam untuk

menunjang pembangunan daerah. Berkaitan dengan sub sektor peternakan telah ditetapkan beberapa peraturan daerah diantaranya PERDA No 10 Tahun 2000 tentang Rumah Potong Hewan (RPH), walaupun masih terbatas pada kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dengan tarif Rp 4 000. Kemudian PERDA No 19 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Hasil Pertanian Peternakan serta pungutan retribusi. Pungutan retribusi menyangkut retribusi pengeluaran termasuk penjualan ternak, terutama pengeluaran ke luar daerah Sulawesi Utara (Pemda Bolaang Mongondow, 2005).

Tarif dan retribusi diatur berdasarkan PERDA provinsi Sulawesi Utara No 3 Tahun 2003. Besarnya keterangan pengeluaran/pemasukan ternak adalah Rp 50 000 dan pengeluaran/pemasukan bibit ternak (aneka ternak) adalah Rp 10 000. Sedangkan keterangan pengeluaran/pemasukan ternak potong Rp 25 000. Kenyataan di lapangan surat keterangan pengeluaran ternak sebesar Rp 10 000 rupiah dikenakan bagi pembeli. Bagi rumah tangga petani peternak dikenakan Rp 10 000 per ekor setelah ternak sapi terjual dan Rp 2 000 per ekor setiap masuk pasar blantik. Dalam penelitian ini disebut biaya administrasi dan biaya retribusi sebagai komponen biaya transaksi. Namun biaya retribusi belum diatur dalam PERDA provinsi Sulawesi Utara No 3 Tahun 2003 tersebut (Pemda SULUT, 2003).

### Biaya Transaksi dalam Usaha Ternak Sapi

Biaya transaksi dalam usaha ternak sapi di Kabupaten Minahasa menurut Elly (2008) adalah biaya yang dikeluarkan rumahtangga mulai aktivitas pembelian input, aktivitas proses produksi sampai distribusi ternak. Masing-masing biaya transaksi tersebut dihitung per volume penjualan atau per kg ternak sapi.

Penelitian Elly (2008), menyatakan bahwa biaya transaksi yang dianalisis untuk usaha ternak sapi adalah biaya transaksi pada saat penjualan ternak sapi. Hal ini disebabkan usaha ternak yang ada merupakan usaha turun temurun

sehingga rumahtangga tidak membeli bibit ternak.

Komponen biaya transaksi dalam usaha ternak sapi diantaranya biaya perantara penjualan sapi, biaya transpor penjualan sapi, biaya retribusi penjualan sapi dan biaya administrasi penjualan sapi (Elly, 2008). Besarnya komponen biaya transaksi tergantung lokasi penjualan ternak sapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani peternak sapi di Minahasa sebagian besar menjual ternak di pasar blantik. Lokasi penjualan ternak sapi oleh petani peternak sesuai hasil penelitian Elly (2008) dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Lokasi Penjualan Ternak Sapi oleh Petani Peternak Sebagai Responden di Minahasa**

Lokasi Penjualan	Jumlah Petani Peternak	
	(Unit)	(%)
1. Pasar Blantik	165	85.50
2. Dirumah Petani Peternak	29	14.50
Total	194	100.00

Berdasarkan data Tabel 1 di atas menunjukkan, petani peternak sapi di Minahasa 85.50 persen (165 petani peternak) menjual ternaknya di pasar blantik, sisanya 14.50 persen menjual dirumah petani peternak atau didatangi pedagang. Hal ini disebabkan, pertama, lokasi penelitian di Minahasa berdekatan dengan pasar blantik, sehingga ternak sapi dapat digiring tanpa menggunakan kendaraan. Kedua, sudah menjadi tradisi di Minahasa untuk menjual ternak di pasar blantik yang pada awalnya pasar blantik tersebut berfungsi sebagai tempat pertukaran ternak (barter).

Petani peternak menjual ternak baik di pasar blantik maupun dirumah petani peternak sesuai hasil penelitian Elly (2008), menanggung biaya

perantara, biaya transpor, biaya retribusi dan biaya administrasi. Namun penjualan ternak sapi di pasar blantik maupun dirumah atau didatangi pedagang menanggung biaya perantara. Biaya-biaya yang terjadi pada saat transaksi dilakukan dinyatakan sebagai *variabel transaction cost*. Menurut Benham and Benham (2001) bahwa ada dua tipe biaya transaksi yang dikenal yaitu: (1) *fixed transaction cost*; dan (2) *variable transaction cost*. *Fixed transaction cost* adalah investasi spesifik yang dinyatakan dalam menentukan susunan kelembagaan, sedangkan *variable transaction cost* adalah biaya yang tergantung pada jumlah atau volume transaksi. Rata-rata biaya transaksi penjualan ternak

sapi per kg dan komponennya sesuai hasil penelitian di Kabupaten

Minahasa sesuai hasil penelitian Elly (2008) dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rata-rata Biaya Transaksi Usaha Ternak Sapi di Kabupaten Minahasa**

Komponen Biaya Transaksi	Minahasa	
	(Rp/Kg)	(%)
1. Biaya Transpor	805.98	13.49
2. Biaya Perantara	5 065.11	84.80
3. Biaya Administrasi	85.25	1.43
4. Biaya Retribusi	16.64	0.28
T o t a l	5 972.98	100.00

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa total biaya transaksi di Minahasa sebesar Rp 5972,98/kg. Hasil penelitian menunjukkan di pasar blantik Minahasa terdapat perantara yang cukup banyak sehingga petani peternak sapi dapat memilih perantaranya. Perantara menentukan harga ternak sapi sesuai berat badan dan tidak diketahui oleh petani peternak. Dalam hal ini baik di pasar blantik maupun di lokasi peternak tidak tersedia fasilitas timbangan ternak sapi, sehingga proses tawar menawar yang terjadi berdasarkan berat badan ternak sapi yang tidak diketahui oleh petani peternak sapi. Berapa besar berat ternak sapi ditentukan oleh perantara. Hal ini yang menyebabkan harga jual yang diterima rumahtangga lebih kecil.

Biaya perantara sudah ditentukan perantara sekitar 10-20 persen dari harga ternak yang terjual. Selanjutnya persentase komponen biaya transaksi yang terbesar adalah biaya perantara penjualan ternak sapi yaitu sebesar 84.80 persen.

Biaya perantara merupakan biaya yang dikeluarkan rumahtangga

petani peternak sapi terhadap jasa perantara dalam penjualan ternak sapi. Besarnya biaya perantara disebabkan perantara yang berperan untuk menghubungkan antara petani peternak dan pedagang. Dalam hal ini, petani peternak sapi tidak mempunyai informasi pembeli atau pedagang. Fenomena ini menunjukkan petani peternak sapi berada pada posisi tawar yang lemah. Walaupun petani peternak sapi di Minahasa masih bisa memilih perantara mana yang bisa diterima sebagai penghubung. Berdasarkan kondisi tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa petani peternak sapi menghadapi struktur pasar tidak sempurna (*imperfect competition*).

Berdasarkan Tabel 2 juga menunjukkan biaya transpor yang dikeluarkan petani peternak sapi sekitar 13.49 persen. Biaya transpor petani peternak sapi di Minahasa terdiri dari biaya transpor ke pasar blantik dan biaya transpor pedagang ke rumah petani. Rata-rata biaya transport penjualan sapi dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rata-Rata Biaya Transpor Penjualan Sapi di Minahasa**

Biaya Transpor	Minahasa	
	(Rp/Kg)	(%)
1. Ke Pasar Blantik	680.35	84.41
2. Ke Rumah Petani	125.63	15.59
T o t a l	805.98	100.00

Tabel 3 menunjukkan biaya transpor petani peternak sapi ke pasar blantik adalah yang terbesar yaitu sebesar Rp 680,35 per kg atau 84,41 persen. Biaya transpor pedagang yang datang ke rumah ditanggung rumahtangga petani peternak sapi di Minahasa lebih kecil (15.59 persen) bila dibandingkan biaya transpor ke pasar blantik. Hal ini disebabkan pedagang yang datang ke rumah petani adalah pedagang yang berdomisili di desa tersebut dan desa lain sekitar lokasi peternakan dan tidak menggunakan kendaraan.

Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan petani peternak sapi pada saat ternaknya terjual. Petani peternak sapi di Minahasa membayar administrasi di pasar blantik sebesar Rp 10 000 per ekor. Di pasar blantik kabupaten Minahasa terdapat petugas dinas pasar dan dinas kehewan, sehingga setiap terjadi transaksi maka rumahtangga langsung membayar biaya administrasi. Biaya transaksi tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah. Berarti setiap terjadi transaksi ada kontrol dari pemerintah. Namun biaya administrasi tersebut belum sesuai PERDA. Biaya administrasi sesuai PERDA di Sulawesi Utara Rp 50 000 per ekor untuk pengeluaran ternak sapi potong.

Biaya retribusi merupakan biaya yang dikeluarkan petani peternak sapi pada saat masuk di pasar blantik dan biaya retribusi yang dibayar ke desa. Besarnya biaya retribusi yang

ditanggung petani peternak sapi di Minahasa yaitu sebesar 0.28 persen. Hal ini disebabkan sebagian petani peternak sapi membayar retribusi di pasar blantik sekitar Rp 2 000 per ekor. Namun biaya retribusi tersebut belum sesuai PERDA. Biaya retribusi sesuai PERDA di Sulawesi Utara Rp 25000 per ekor untuk ternak sapi potong. Dalam hal ini petani peternak sapi membayar biaya retribusi masih lebih rendah dibanding yang ditentukan di PERDA.

#### Efisiensi Usaha

Kriteria untuk melihat efisiensi diantaranya rasio biaya transaksi/penerimaan, rasio biaya transaksi/biaya dan rasio biaya transaksi/pendapatan. Biaya transaksi sesuai hasil penelitian Elly (2008) dapat menentukan efisiensi usaha ternak sapi per kg ternak sapi di Minahasa (Tabel 4).

Tabel 4 menunjukkan bahwa rasio biaya transaksi dan penerimaan per kg ternak sapi hidup pada usaha ternak sapi di Minahasa sebesar 0.17. Artinya dengan penerimaan usaha ternak sapi sebesar Rp 1 maka petani peternak sapi di Minahasa akan menanggung biaya transaksi sebesar Rp 0.17. Hasil ini lebih kecil dibanding hasil penelitian Anggraini untuk nelayan kincang (sebesar 0.24) (Anggraini, 2005).

**Tabel 4. Rasio Biaya Transaksi terhadap Penerimaan, Total Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak Sapi di Minahasa**

Uraian	Minahasa	
	(Rp/Kg)	Rasio
1. Biaya Transaksi	5 972.98	
2. Penerimaan	35 000.00	0.17
3. Total Biaya	22 347.43	0.27
4. Pendapatan	12 652.57	0.47

Rasio biaya transaksi dan total biaya ternak sapi per kg pada usaha ternak sapi petani peternak di Minahasa sebesar 0.27. Artinya dengan total biaya ternak sapi per kg sebesar Rp 1 maka petani peternak sapi di Minahasa akan menanggung biaya transaksi sebesar Rp 0.27.

Nilai rasio biaya transaksi dan pendapatan per kg ternak sapi petani peternak di Minahasa sebesar 0.47. Artinya dengan pendapatan per kg ternak sapi sebesar Rp 1 maka petani peternak sapi di Minahasa akan menanggung biaya transaksi sebesar Rp 0.47. Kondisi ini menurut Elly (2008) akan berbeda apabila rasio biaya transaksi/penerimaan, biaya transaksi/biaya dan biaya transaksi/pendapatan dihitung berdasarkan integrasi usaha. Menurut Elly (2008) bahwa integrasi usaha ternak sapi-jagung rumahtangga petani peternak sapi di Minahasa lebih efisien dibanding apabila usaha ternak sapi tanpa integrasi. Bamualim *et al.* (2004) mengemukakan bahwa keuntungan langsung integrasi usaha ternak sapi-tanaman pangan adalah peningkatan pendapatan dari penjualan ternak dan jagung. Sedangkan keuntungan tidak langsung adalah perbaikan kualitas tanah akibat pemberian pupuk kandang pada lahan sawah tadah hujan. Kariyasa dan Kasryno (2004) menjelaskan lebih

lanjut bahwa usaha ternak sapi akan efisien jika manajemen pemeliharaan diintegrasikan dengan tanaman sebagai sumber pakan bagi ternak itu sendiri. Integrasi usaha ternak sapi-tanaman juga dapat dilakukan sebagai upaya meminimalkan biaya transaksi (Whinston, 2003 dan Williamson, 2008). Tetapi Elly (2008) mengemukakan bahwa usaha ternak sapi yang terintegrasi dapat dilakukan melalui kelompok. Berdasarkan pemikiran tersebut perlu pembentukan kelompok-kelompok usaha ternak sapi, sebagai salah satu upaya memperbaiki kelembagaan penjualan ternak sapi. Menurut Fagi *et al.* (2004); Fagi dan Kartaatmadja (2004), usaha ternak sapi dilakukan dengan berkelompok memiliki keuntungan diantaranya memperkuat posisi tawar petani dalam penjualan ternak

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa biaya transaksi yang dikeluarkan petani peternak sapi di Minahasa adalah biaya perantara, transport, administrasi dan retribusi. Biaya transaksi yang terbesar adalah biaya perantara.

#### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa perlu intervensi pemerintah dalam perbaikan kelembagaan dalam bentuk kelompok atau koperasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allen, D.W and D. Lueck. 2004. *The Nature of The Farm. Contracts, Risk and Organization in Agriculture*. The MIT Press.
- Anggraini, E. 2005. Analisis Biaya Transaksi dan Penerimaan Nelayan dan Petani di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Bamualim, A., R.B. Wirdahayati dan M. Boer. 2004. Status dan Peranan Sapi Lokal Pesisir di Sumatera Barat. Prosiding Seminar. Sistem Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Benham, A and L. Benham. 2001. *Marketing Methods and Income Generation Amongst Small-Scale Farmers in Two Communal Areas of Kwazulu-Natal, South Africa*. School of Agricultural Sciences and Agribusiness. University of Natal, Pietermaritzburg, South Africa. [http://ifmaonline.org/pages/conv\\_full\\_articles.php](http://ifmaonline.org/pages/conv_full_articles.php).
- Dutilly-Diane, C., E. Sadoulet and A. de Janvry. 2003. Household Behavior Under Market Failures: How Natural Resource Management in Agriculture Promotes Livestock Production in the Sahel. Department of Agricultural and Resource Economics. University of California, Berkeley.
- Elly, F.H. 2008. Dampak Biaya Transaksi Terhadap Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Usaha Ternak Sapi-Tanaman di Sulawesi Utara. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Fagi, A.M., A. Djajanegara., K. Kariyasa dan I.G. Ismail., 2004. Keragaman Inovasi Kelembagaan dan Sistem Usahatani Tanaman – Ternak di Beberapa Sentra. Prosiding Seminar. Sistem Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Fagi, A.M. dan S. Kartaatmadja., 2004. Dinamika Kelembagaan Sistem Usahatani Tanaman-Ternak dan Diseminasi Tehnologi. Prosiding Seminar. Sistem Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Kariyasa, K dan F. Kasryno., 2004. Dinamika Pemasaran dan Prospek Pengembangan Ternak Sapi di Indonesia. Prosiding Seminar. Sistem Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Kiswanto, A. Prabowo dan Widyantoro. 2004. Transformasi Struktur Usaha Penggemukan Sapi Potong di Lampung Tengah. Prosiding Seminar. Sistem dan Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Matungul, P.M., G.F. Ortmann and M.C. Lyne. 2006. Marketing Methods and Income Generation Amongst Small-Scale Farmers in Two Communal Areas of Kwazulu-Natal, South Africa. School of Agricultural Sciences and Agribusiness. University of Natal, Pietermaritzburg.
- Pemerintah Bolaang Mongondow. 2005. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 114 Tahun 2005 Tentang Penyesuaian Struktur dan Besarnya Tarif Sementara Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Kabuapen Bolaang Mongondow, Kotamobagu.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2003. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- Sadoulet, E and A. de Janvry. 1995. Household Models. In : Quantitative Development Policy Analysis. John Hopkins University Press. Baltimore.
- Sartorius, K. 2006. The Cost Efficiency of Small Farm Inclusion in Agribusiness Supply Chains. <http://www.wits.ac.za/accountary/staff/sartoriusk/research/>
- Whinston, M.D., 2003. On the Transaction Cost Determinants of Vertical Integration. Oxford University Press. <http://ideas.repec.org/a/oup/jleor/g/v19v2003ilpl-23>. Html[080708]. Download 7 Juli 2008.
- Williamson, O.E., 2008. Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations. University of Pennsylvania. <http://www.jstor.org/pss/725118>.